

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembangunan karakter bangsa (*National Character Building*) dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai suatu negara-bangsa (*nation-state*). Di Indonesia, upaya pembangunan karakter bangsa ini telah menjadi masalah serius sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia karena suatu kenyataan bahwa kondisi bangsa Indonesia saat itu menghadapi masalah konsolidasi kekuasaan. Seorang Indonesianis, Herbert Feith, mengemukakan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan dari sudut entitas politik, sebagai berikut.

*The difficulties which this situation presaged for the process of power consolidation become clear if one looks at the character of Indonesia as a political unit and examines the divisive forces growing from its geographical, economic, and sociocultural organization. (Feith, 1962:26)*

Menurut Feith, dari sudut pandang kesatuan politik, wilayah geografis Indonesia yang lebih dominan unsur lautan bukanlah rintangan utama untuk membangun karakter melainkan masalah kesenjangan antara kehidupan kota besar dengan wilayah perdesaan (*rural areas*) yang akan lebih mudah memicu konflik. Demikian pula dalam aspek ekonomi, masalah kebijakan pemerintah pusat tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat Jawa dan luar Jawa serta masalah sumber daya alam akan mudah mengundang konflik vertikal (*major centrifugal pressure*).

Namun, masalah laten yang telah lama muncul bahkan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan adalah masalah kenyataan masyarakat Indonesia secara sosiokultural. Feith (1962) mengemukakan:

*Indonesian Society in 1949 was beset with cleavages and obstacles to the attainment of consensus and legitimate authority as a result of ethnic and religious diversity, of the fact that loyalties and solidarity feelings attached to each of a large number of communal and quasi-communal groupings. Indonesia was a "plural society", a "mosaic society", a "multigroup society".* (Feith, 1962:27)

Solusi dalam menghadapi masalah di atas menurut Feith (1962:27-28) adalah dengan memperkuat rasa kebangsaan bagi seluruh warga negara Indonesia (*Indonesian nasionalism*) sedangkan kesamaan Agama Islam (*a particular set of religious loyalties*) dapat memperkuat proses identifikasi setiap etnis yang ada di wilayah nusantara. Temuan ini cukup untuk memperkuat tesis hasil kajian George McTurnan Kahin (1952:38) yang menyatakan bahwa "*One of the most important factors contributing to the growth of an integrated nationalism was the high degree of religious homogeneity*".

Hasil kajian Feith selama sekira sepuluh tahun (1951-1960) pun sejalan dengan Pidato Pembelaan Bung Karno di muka Hakim Kolonial pada Tahun 1930 yang menyatakan bahwa:

... di dalam kesadaran nasionaliteit, di dalam nasionalisme inilah letaknja daja, jang nanti bisa membuka kenikmatan hari kemudian. ... Kami punja nasionalisme haruslah nasionalisme jang positif, suatu nasionalisme jang *mentjipta*, suatu nasionalisme jang "mendirikan", suatu nasionalisme jang "mentjipta dan memudja". Dengan nasionalisme jang positif itu maka rakjat Indonesia bisa mendirikan *sjarat-sjarat hidup merdeka jang bersifat kebendaan dan kebatinan*. (Soekarno, 1930: 117)

Pentingnya sebuah bangsa memiliki nasionalisme positif digambarkan pula oleh Bung Karno dengan mengutip pendapat pemimpin Mesir yang termashur, Mustafa Kamil, sbb.:

“Oleh karena rasa kebangsaanlah, maka bangsa-bangsa yang terbelakang lekas mencapai peradaban, kebesaran dan kekuasaan. Rasa kebangsaanlah yang menjadi darah yang mengalir dalam urat-urat bangsa-bangsa yang kuat dan rasa kebangsaanlah yang memberi hidup kepada tiap-tiap manusia yang hidup”. (Soekarno, 1930: 118)

Demikian pentingnya nasionalisme bagi suatu bangsa dalam mengisi kehidupan bernegara walaupun pada saat itu kondisi bangsa ada dalam kekuasaan bangsa lain. Bung Karno telah berhasil membangun benih-benih karakter bangsa calon penghuni Republik ini dengan tercapainya perjuangan melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kahin (1952) mengemukakan bahwa *“The beginnings of Indonesian nationalism cannot be precisely or even roughly dated. ... It might be argued that latent nationalisms of an embryonic character have existed within the chief Indonesian societies since then...”*. Kenyataan ini menunjukkan bahwa nasionalisme sebagai karakter embrionik telah ada dalam hati sanubari bangsa jauh sebelum tercapainya kemerdekaan. Pada pasca masa kemerdekaan, konsep nasionalisme masih tetap relevan dan diperlukan oleh sebuah negara-bangsa. Bagaimana membangun dan memelihara nasionalisme ini agar tetap eksis dalam mencapai peradaban, kekuasaan, dan kebesaran bangsa? Secara spesifik, bagaimana membangun dan memelihara nasionalisme bagi eksistensi bangsa Indonesia untuk mencapai peradaban, kekuasaan dan kebesaran bangsa?

Pembangunan karakter untuk memelihara nasionalisme merupakan proses kompleks yang memerlukan waktu lama dan tidak pernah selesai. Craig Reynolds menyatakan "*the nation is a building that will never be finished*" bahkan seorang Indonesianis, Anthony Reid, menekankan bahwa pembangunan karakter bangsa di Indonesia sebagai "*the discontinuities that have challenged historians again and again to capture the whole picture whether of state or nation*" (Gungwu, 2005:4). Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa seyogianya melibatkan berbagai komponen bangsa, baik pada tataran supra maupun infrastruktur politik, teoritis maupun praktis, berbagai komponen pendidikan pada seluruh jenjang dan jenis, serta partisipasi seluruh warga negara-bangsa.

Dari seluruh komponen berpengaruh tersebut, komponen pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis. Pendidikan sebagai wahana transformasi budaya, nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bahkan seni telah menjadi pusat untuk pembangunan karakter bangsa baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Sejumlah bahan kajian dan mata pelajaran pun telah ditawarkan, baik yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah untuk jangka waktu tertentu maupun berdasarkan pada tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Bahan kajian yang telah menjadi program pendidikan dan ditawarkan di Indonesia yang tetap eksis hingga kini adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Bidang kajian ini secara akademik dikenal sebagai *Civic Education* atau *Citizenship Education*.

Belum banyak pemikiran tentang PKn, baik yang memfokuskan pada materi, pendekatan maupun strategi membangun karakter dan kepribadian bangsa lebih-lebih yang mengkaji PKn dari sudut pandang filsafat keilmuan.

Hingga saat ini bahan kajian ini masih dalam proses penemuan jati diri, seperti pengembangan objek telaah, proses generalisasi dan teorisasi, dan kegunamaannya. Lebih lanjut, secara filosofis bahan kajian ini tengah direkonstruksi dan diperkuat agar posisinya dalam konteks disiplin ilmu maupun pendidikan disiplin ilmu semakin jelas dan ajeg.

Dengan pertimbangan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara maka pada tahun 1970-an mulai diperkenalkan Pendidikan IPS (PIPS) sebagai pendidikan disiplin ilmu. (Istilah pendidikan disiplin ilmu pertama kali dikemukakan oleh Numan Somantri dalam berbagai karya tulis). PKn yang telah lebih dahulu diperkenalkan di lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah memiliki karakteristik sebagai pendidikan disiplin ilmu. Namun, PKn dalam konteks PIPS merupakan salah satu tradisi *Social Studies*, *citizenship transmission* (Barr, Barth, dan Shermis, 1977), sehingga keterkaitan antara dua pendidikan disiplin ilmu ini begitu erat. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam tentang PKn dalam konteks keilmuan seyogianya ditinjau dari posisinya sebagai pendidikan disiplin ilmu.

Hingga saat ini, PIPS dan PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu masih menghadapi masalah dan tantangan baik dalam konteks kajian keilmuan, telaah akademik, pelaksanaan kurikuler maupun pengembangan pendidikan disiplin ilmu (Somantri, 1987, 2001; Winataputra, 2001; Wahab, 1999; Al Muchtar 1992). Upaya pembangunan karakter bangsa melalui PKn sebagai mata pelajaran di sekolah yang telah berlangsung sejak lama itu belumlah optimal dan belum berhasil mencapai harapan, bahkan hingga saat ini program pendidikan ini malah dipertanyakan keberadaan dan perannya. Diasumsikan

munculnya pertanyaan ini karena hingga kini upaya pengkajian secara konseptual untuk menjawab pertanyaan: mengapa setiap negara memerlukan PKn, apa hakikat PKn, dan apa objek atau materi kajian PKn di Indonesia dengan basis pendidikan disiplin ilmu maupun sebagai program kurikuler untuk pembangunan karakter bangsa nampaknya masih belum banyak tersentuh. Tidak terlalu keliru pendapat Jareonsettain (1999) yang menyatakan *“we have a crisis of character at the root of all the troubles everywhere and the crisis has come about as a result of education without refinement of character”*. Oleh karena itu, upaya perbaikan strategi maupun reorganisasi materi kajian PKn untuk membangun karakter bangsa perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, sedangkan upaya pengkajian filosofis pun perlu dilakukan sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Nusantara (2003:67) menyatakan bahwa *“perkara pembangunan watak (character building) merupakan suatu tuntutan perubahan yang tanpa henti (never ending process), sebuah upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, sehingga tidak pernah ada kata terlambat.”*

Di Indonesia sendiri, upaya pembaharuan PKn terus mengalami perubahan ke arah perbaikan terutama pada aspek metode pembelajaran. Perhatian pada aspek materi *“content”*, terutama diberikan ketika ada perubahan besar dan mendasar dalam berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang terjadi pada satu dekade terakhir. Perhatian yang diberikan selama ini oleh para pakar maupun praktisi tentang masalah materi kajian PKn menunjukkan banyak ragam pandangan dan rumusan yang terkadang menimbulkan kebingungan pada tingkat operasional di lapangan. Selain adanya perubahan nama sejalan dengan perubahan sistem politik

bahkan perkembangan kondisi politik internasional, mata pelajaran ini tidak steril terhadap perubahan dalam substansi materi khususnya dalam tataran kurikulum sekolah.

Memasuki abad ke-21 atau era reformasi, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah pandangan (*point of view*) tentang PKn sesuai dengan arah dan tujuan dari masing-masing program, misalnya pada tingkat perguruan tinggi saat ini terdapat mata kuliah umum yang bernama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), pada tingkat sekolah dasar dan menengah terdapat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada perkembangan selanjutnya di tingkat sekolah dasar, dikenal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial (PKPS), bahkan dalam draf Kurikulum 2004 yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum (Puskur), Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan Nasional (Balitbang Diknas) dikenal nama mata pelajaran Pengetahuan Sosial untuk SMP dan Kewarganegaraan untuk SMA (Balitbang Diknas, 2004).

PKn di Perguruan Tinggi merupakan nama mata kuliah umum yang menggantikan mata kuliah Pendidikan Kewiraan sedangkan PKPS SD, Pengetahuan Sosial SMP, dan Kewarganegaraan SMA adalah nama mata pelajaran di tingkat persekolahan yang menggantikan mata pelajaran PPKn (Depdiknas, 2004).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), PKn merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Ketentuan ini lebih jelas dan diperkuat lagi pada Pasal 37 bagian Penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa

“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dengan adanya ketentuan UU tersebut maka kedudukan PKn dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap. Meskipun demikian, diasumsikan adanya perubahan nama untuk PKn disebabkan belum adanya kesepakatan terhadap landasan filosofis yang bersifat ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi landasan berpikir para pakar dan praktisi. Dengan kata lain, objek telaah PKn hasil kajian bersama secara konseptual-ontologis belum terwujud sehingga diasumsikan permasalahan inilah yang banyak menimbulkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) tentang substansi materi kajian antar mata pelajaran baik di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat persekolahan.

Persoalan tentang kedudukan PIPS dan PKn ditinjau dari kacamata filsafat ilmu sangat penting bagi eksistensi dan tegak-kokohnya program pendidikan ini. Somantri (2001:89) pernah mempertanyakan: (a) *objek apa yang ditelaah oleh PIPS? – ontologi*; (b) *bagaimana proses terjadinya generalisasi dan teori dalam PIPS ini? – epistemologi*; dan (c) *untuk apa Pendidikan IPS akan digunakan? – aksiologi*. Tentang permasalahan objek telaah atau materi kajian dalam PIPS ini tidak banyak berbeda dengan apa yang dialami oleh PKn. Dalam tulisan ini, fokus kajian secara khusus terkait dengan masalah objek telaah PKn. Dengan dasar pertimbangan inilah, maka permasalahan lebih lanjut yang muncul berkenaan dengan permasalahan ontologis PKn ialah bukan hanya pada bagaimana cara membentuk melainkan pada objek telaah apa yang-ada (*being*) dan kenyataan (*reality*) untuk membangun karakter bangsa dan warga negara yang baik berdasarkan

Pancasila dan UUD'45. Menurut Pranarka (1985:23), secara empiris Pancasila telah mengalami berbagai gejolak pemikiran yang terbagi ke dalam lima periode.

*Periode Pertama:* meliputi pemikiran-pemikiran tentang Pancasila selama masa Sidang BPUPKI (2-9 Mei 1945 sd. 17 Juli 1945). *Periode Kedua:* pemikiran-pemikiran tentang Pancasila selama berlakunya UUD 1945 yang pertama (18 Agustus 1945 sd. 26 Desember 1949). *Periode Ketiga:* pemikiran-pemikiran Pancasila selama berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 sd. 16 Agustus 1950). *Periode Keempat:* pemikiran-pemikiran tentang Pancasila selama berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950 sd. 5 Juli 1959); *Periode Kelima;* pemikiran-pemikiran tentang Pancasila selama berlakunya UUD 1945 yang kedua kalinya (5 Juli 1959 sd. sekarang).

Pembagian menurut periodisasi ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi telah mengalami perkembangan pemikiran sejalan dengan perkembangan jaman yang terus berubah. Perkembangan pemikiran Pancasila ini telah berdampak pada perubahan dalam sistem pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa PKN sebagai kajian yang erat dengan persoalan ideologi Pancasila tidak mungkin dapat terhindar dari perubahan pemikiran yang terjadi dalam Pancasila sesuai dengan periodisasinya.

### **1. Dampak Perubahan Sosial terhadap PKN**

Pada akhir abad ke-20 atau menjelang memasuki abad ke-21, kondisi bangsa Indonesia mengalami proses perubahan yang sangat mendasar dan berarti dalam setiap pranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya perubahan ini karena secara politik, bangsa Indonesia berada pada pasca politik Orde Baru dan tengah memasuki era baru yang dikenal dengan era

reformasi. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) melalui Amandemen I, II, III, IV oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1999-2002 seyogianya diikuti oleh perubahan dalam berbagai tatanan kehidupan politik di Indonesia termasuk dalam PKn. Perubahan bukan sekedar perihal nama semata melainkan pada tataran substansi.

Secara teoritis, dampak perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini pernah dikemukakan oleh para ahli politik, seperti Aristoteles (1995:90) yang mengemukakan bahwa secara konstitusional “...*different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function,*” sedangkan Cogan (1998:2-3) mengidentifikasi lima atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: (1) *a sense of identity*; (2) *the enjoyment of certain rights*; (3) *the fulfilment of corresponding obligations*; (4) *a degree of interest and involvement in public affairs*; and (5) *an acceptance of basic societal values*. Bagi Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, ialah UUD RI 1945 dan Amandemennya.

Tidak diragukan bahwa PKn sangat diperlukan dan memiliki nilai serta kedudukan yang sangat strategis bagi ‘*national character building*’ dalam arti seluas-luasnya terutama dalam membentuk warga negara yang baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, PKn sangat rentan terhadap *bias politik praktis penguasa (the Ruling Class)* sehingga ia cenderung lebih

merupakan instrumen penguasa daripada sebagai wahana pembangunan watak bangsa berdasarkan konstitusi. Hal senada terjadi pula pada sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah hasil penelitian para ahli *Civic Education* (Apple, 1979, 1982; Bourdieu and Passeron, 1977; Snyders, 1976; Whitty, 1985) yang mengemukakan:

*It (citizenship education) has also often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education" (Cogan, 1998: 5).*

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika rekayasa kurikulum PKn acapkali mendapat tekanan-tekanan yang berasal dari suara dan keinginan politik penguasa.

Hasil analisis terhadap perkembangan pendidikan demokrasi melalui PKn di Indonesia (Winataputra, 2001) menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar pada tingkatan paradigma sehingga telah mengakibatkan ketidakjelasan, baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis. Kelemahan-kelemahan tersebut, paling tidak, terdiri atas empat kelemahan pokok, yakni: (1) kelemahan dalam konseptualisasi PKn (2) penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral behavioristik, terperangkap pada proses penanaman nilai yang cenderung indoktrinatif (*values inculcation*); (3) Ketidakkonsistenan penjabaran berbagai dimensi tujuan PKn ke dalam kurikulum; dan (4) Keterisolasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya. Sejalan dengan penilaian di atas, Wahab (1999) mengemukakan beberapa kelemahan yang ada pada PKn di masa yang lalu, sebagai berikut: (1) Terlalu

menekankan pada aspek nilai moral yang menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) Kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) Pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif; dan (4) Berorientasi pada kepentingan penguasa.

Dipandang dari aspek struktur disiplin ilmu, PKn sebagai salah satu pendidikan disiplin ilmu belum dapat dikategorikan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri terutama bila digandengkan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial (IIS) tradisional. Selama ini, PKn lebih dikenal sebagai program pendidikan untuk membangun karakter warga negara dengan tujuan akhir agar ia menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*). Meskipun demikian, sebagai kajian akademis, PKn yang ada di setiap negara, selayaknya memiliki filsafat akademik sebagai cabang tak terpisahkan baik dari ilmu pendidikan maupun IIS lain khususnya Civics dan Ilmu Politik.

Menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada, baik pada tataran konseptual, struktur, praksis, maupun masalah keterkaitan dengan aspek akademik dan budaya bangsa maka diusulkan bahwa perlu ada kajian terhadap PKn secara filosofis mengingat selama ini upaya analisis terhadap bidang ini masih langka. Dengan adanya kajian terhadap masalah filosofis diharapkan persoalan-persoalan PKn yang muncul baik pada tataran konseptual, teoritis, bahkan praksis akan lebih memberikan alternatif solusi dalam proses analisis masalah. Dengan kata lain, perlu ada kejelasan tentang keberadaan dan peran PKn baik secara akademik sebagai pendidikan disiplin ilmu yang sedang tumbuh maupun dalam tataran budaya yang sedang

mengalami perkembangan sehingga dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat dan bangsa karena memiliki nilai fungsional.

Bertolak dari kondisi di atas, maka upaya pengembangan PKn hendaknya: (1) memiliki landasan konseptual secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan holistik; (2) memiliki sandaran filosofis-ilmiah yang kokoh; (3) terbebas dari pengaruh kepentingan politik sesaat dari *the ruling class*; (4) memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kurikulumnya, yang mengacu pada misi dan fungsi pembangunan kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; (5) seimbang antara pengembangan nilai dan moral dengan pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (6) menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa dogmatis-indoktrinatif, tetapi menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif; (7) terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budayanya; dan (8) mempersiapkan dan mengembangkan bahan-bahan yang diambil dari isu-isu global untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran warga negara sebagai warga dunia (*global citizen*).

Untuk merealisasikan arah pengembangan materi kajian PKn, selayaknya dilakukan analisis atau kajian ontologis terhadap gagasan-gagasan dan dasar-dasar tentang PKn. Sejumlah dokumen negara, kebijakan pemerintah, dan konsep pikir para pakar yang berlatar belakang multi disiplin diasumsikan dapat berkontribusi untuk menentukan pangkal tolak dan arah pengembangan program PKn yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam era demokrasi konstitusional.

Dengan adanya kajian secara ontologis diharapkan akan diperoleh suatu gagasan konseptual-filosofis PKn yang sesuai dengan prinsip-prinsip akademik dan budaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang ditandai oleh adanya masyarakat demokratis.

## 2. Masalah Pembangunan Karakter Warga Negara Melalui PKn

Upaya membangun karakter warga negara pada dasarnya adalah proses pewarisan nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan nasional yang tertera dalam konstitusi negara serta pesan para pendiri negara (*the founding fathers*). Tujuannya, sebagaimana pesan UUD 1945, adalah untuk mewujudkan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai kebesaran dan kejayaan dalam suasana kemerdekaan. Pidato Pembelaan Bung Karno di muka Hakim Kolonial pada Tahun 1930 menegaskan:

Kalau bangsa Indonesia ingin mentjapai kekuasaan politik, yakni ingin merdeka, kalau bangsa kami itu ingin menjadi tuan didalam rumah *sendiri*, maka ia harus mendidik diri *sendiri*, mendjalankan perwalian atas diri *sendiri*, berusaha dengan kebiasaan dan tenaga *sendiri!* (Soekarno,1930: 92)

Dari pernyataan Bung Karno ini jelas bahwa salah satu karakter warga negara yang harus dibangun adalah karakter kemandirian sebagai sebuah bangsa. Pentingnya karakter ini pernah disampaikan pula oleh Bung Hatta ketika berjuang melalui organisasi Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda pada 1929 dengan menyatakan:

Kesadaran yang mendalam, bahwa kemerdekaan Tanah Air hanya dapat dicapai dengan tenaga dan kekuatan sendiri, dan kesadaran akan panggilan untuk memimpin bangsanya dari kegelapan menuju ke dunia yang terang, semua itu telah

membangkitkan kerelaan pada banyak mahasiswa Indonesia di negeri ini untuk mengesampingkan kepentingan sendiri, dan mengorbankan diri pribadi. (Hatta, 1976: 24)

Dari pernyataan dua proklamator kemerdekaan Republik Indonesia ini semakin jelas karakter bangsa Indonesia yang diharapkan jauh sebelum lahir bangsa dan berdirinya negara Indonesia. Lebih lanjut, Hatta (1929:27) menegaskan bahwa "selain mengusahakan kerukunan yang lebih erat, juga harus menumbuhkan rasa solidariteit, kesetiakawanan diantara orang-orang Indonesia". Apabila dihubungkan dengan kehidupan masa kini maka nilai-nilai tersebut tampaknya masih tetap relevan untuk diterapkan dan diwariskan kepada generasi kini yang hidup di era perubahan yang begitu cepat.

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan diri menjadi suatu negara yang berdaulat telah memiliki konstitusi dan bertekad untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Sistem pemerintahan maupun praktik hidup bermasyarakat yang dicita-citakan dalam UUD 1945 tidak diragukan memiliki semangat demokratis.

Bagaimana mengaktualisasikan karakter bangsa yang dicita-citakan oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, khususnya melalui PKN? Diperlukan adanya suatu upaya dan proses pendidikan demokrasi yang sungguh-sungguh mengingat secara historis, bangsa Indonesia memiliki latar belakang sistem pemerintahan kerajaan (*feudalistic*) yang berbeda dengan sistem demokrasi. Kondisi yang tidak kondusif ini pernah diakui oleh Prijono, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI Tahun 1959, dengan menyatakan bahwa "*One other thing which conflicts with our morality is feudal morality; this clearly cannot be*

*permitted to exist, in view of the Pantja Sila's principle of the Sovereignty of the People.*" (Feith, 1970:329) Oleh karena itu, masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi titik rawan ini perlu terus dicari solusinya.

Dengan memperhatikan pesan konstitusi dan cita-cita para pendiri negara, dapat disimpulkan bahwa transformasi nilai-nilai demokrasi bagi generasi kini dan mendatang yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat demokratis perlu dilakukan. Alexis de Toqueville (dalam Branson, 1998:2) menyatakan bahwa "*each new generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skills, and develop the dispositions or traits of private and public character that undergird a constitutional democracy*". Dari pernyataan ini ada pelajaran yang dapat dipetik dalam proses pembentukan suatu masyarakat demokratis, yakni perlunya penyelenggaraan pendidikan demokrasi yang terus-menerus (*continuous*) dan berkesinambungan baik melalui lembaga persekolahan (*school civic education*) maupun melalui lembaga masyarakat (*community civic education*). "Demokrasi bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya" (Branson, 1999).

Sedikitnya ada dua tantangan yang cukup berat untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter dan budaya demokratis (*democratic culture*) di Indonesia. *Pertama*, tantangan historis, ialah tantangan kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang kehidupan masyarakat yang bersistem kerajaan dan penjajahan (*colonialism, imperialism*). Suatu proses mengubah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dari budaya masyarakat yang telah lama berkehidupan secara feodalistis ke masyarakat demokratis

bukan hal yang mudah. *Kedua*, mempertahankan dan atau memelihara budaya masyarakat dan warga negara yang sedang belajar menjalankan kehidupan demokratis agar secara berkesinambungan ditransformasikan kepada generasi berikutnya.

Adanya tantangan untuk membangun masyarakat demokratis, pada hakikatnya bukan merupakan cacat (*handicapped*). Amerika Serikat yang telah lama membangun masyarakat berkehidupan secara demokratis tidak terhindar dan selalu dihadapkan pada tantangan (*dilemma*) dalam pemerintahan dari waktu ke waktu, seperti "*freedom versus order, freedom versus equality, liberal versus conservative*" (Janda, Berry, and Goldman, 1989). Mereka secara terus menerus melakukan pembaharuan melalui *civic education* dengan cara menyesuaikan materi kajian, strategi dan pendekatan dari waktu ke waktu. Tantangan ini sekaligus akan menjadi masalah pula bagi Indonesia, seperti bagaimana mengidentifikasi, mengungkap (*clarify*) dan mendeskripsikan kondisi masyarakat yang berada pada masa transisi (*from undemocratic to democratic society*). Proses pendidikan merupakan alternatif yang kuat dan strategis dalam menjawab tantangan dan memecahkan masalah ini.

Proses pendidikan demokrasi yang sangat strategis, khususnya untuk generasi mendatang adalah melalui proses pembelajaran PKn di lingkungan masyarakat sekolah (*school civic education*). Memperhatikan masalah yang dihadapi baik pada tataran teoritis maupun aplikatif sebagaimana diuraikan di atas, Somantri (1993) menegaskan bahwa pengorganisasian dan penyajian PKn hendaknya secara psikologis dan ilmiah di dalam kelas sebagai "laboratorium demokrasi" untuk menumbuhkan "*creative dialogue*", sebagai ciri masyarakat demokrasi. Meskipun demikian, kondisi iklim (*climate*,

*atmosphere*) sekolah tidak luput pula dari sejumlah tantangan, antara lain: *pertama*, tantangan budaya sekolah di Indonesia yang menunjukkan ciri/sifat lebih birokratis daripada demokratis; *kedua*, pengorganisasian kurikulum sekolah di Indonesia lebih bersifat sentralistis yang berdampak pada pengelolaan kelas oleh guru dan kepemimpinan sekolah yang bersifat "*imperative dialogue*"; dan *ketiga*, kondisi lingkungan masyarakat yang paternalistis. Kondisi ini tentunya tidak kondusif untuk membangun iklim sekolah dan masyarakat dalam mempersiapkan dan membentuk warga negara yang demokratis. Untuk menata dan mengembangkan PKn guna mendorong warga negara kearah iklim yang kondusif dengan cita-cita dan tujuan nasional yakni menciptakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi PKn sesuai karakteristik, fungsi dan perannya. Kajian PKn pada tingkatan yang mendasar ini dapat berarti mempertanyakan PKn dari berbagai sudut pandang termasuk masalah hakikat, landasan, nilai kebermaknaan dan kegunamanfaatan.

Sejumlah pertanyaan pokok dalam penelitian ini yang akan digali melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi meliputi: apa hakikat dan substansi materi kajian PKn yang seyogianya dikembangkan untuk membangun karakter warga negara? Apa peran PKn sebagai wahana pembangunan karakter warga negara? Apa hakikat karakter bangsa dan bagaimana proses pembangunan serta tantangannya untuk masa kini dan masa mendatang? Untuk memperoleh jawaban yang rasional dan ilmiah-alamiah maka perlu ada pengkajian yang cermat dan sistematis. Secara hipotetis, apabila pertanyaan-pertanyaan itu telah ada solusi, maka pada gilirannya akan diperoleh suatu materi kajian PKn yang sesuai dan layak untuk

membentuk karakter warga negara Indonesia yang baik dan sekaligus pula membentuk karakter bangsa.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa secara fenomenologis, ada sejumlah permasalahan terkait dengan kenyataan PKn di Indonesia.

*Pertama*, belum lengkapnya bidang telaah/kajian PKn sehingga menimbulkan penafsiran dan persepsi yang beragam sebagai akibat belum adanya kesamaan pemikiran yang didukung oleh komunitas akademik. Sejumlah penelitian yang dilakukan umumnya ada pada tataran teknis-operasional pembelajaran atau obyek telaah PKn aspek instrumental dan praksis (Winataputra, 2001). Sesuai dengan tugasnya, PKn harus terus-menerus secara berkesinambungan mengembangkan batang tubuh keilmuan (*the body of knowledge* atau *the scientific boundary line*) yang dapat memperkuat status keilmuan. PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu tidak boleh berhenti melakukan kajian telaah akademik sebagai wahana pengembangan keilmuan disamping tugas pengembangan yang bersifat praksis-operasional.

*Kedua*, secara substansial terdapat beragam persepsi tentang bidang kajian PKn menurut kepentingan pihak-pihak tertentu dan *trend* perkembangan sosial budaya, politik, ideologi bahkan situasi global. Adanya ragam persepsi ini diasumsikan karena belum adanya kajian filosofis terhadap substansi materi kajian PKn, khususnya dalam kajian ontologis untuk membangun karakter warga negara yang dapat dijadikan rujukan oleh para pengembang kurikulum. Pengutamaan strategi yang lebih menekankan pada aspek nilai moral belaka

dan menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu telah menimbulkan penyimpangan (*bias*) dalam pembangunan karakter warga negara karena materi kajian PKn terisolasi dari tradisi keilmuan dan lingkungan sosial budaya.

*Ketiga*, suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia tengah berada dalam proses perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya perubahan ini karena secara politis, bangsa Indonesia berada pada pasca politik Orde Baru dan tengah memasuki era baru yang dikenal dengan era reformasi yang memiliki iklim berbeda dari iklim politik sebelumnya. Indikator mendasar pada era ini adalah perubahan konstitusi dan sejumlah perangkat perundang-undangan, serta perubahan perilaku warga negara kearah demokratisasi dalam segala aspek kehidupan. Kenyataan ini pada gilirannya berdampak terhadap perlunya perubahan dalam sistem pendidikan nasional. PKn sebagai bidang kajian yang sangat erat dengan upaya pembangunan karakter bangsa sudah menjadi keniscayaan melakukan penyesuaian materi kajian secara konseptual dan filosofis sesuai dengan tuntutan masyarakat, tantangan kehidupan masa kini dan masa depan serta kepentingan nasional.

Kajian konseptual-filosofis untuk memperkuat dan mengembangkan struktur dan batang tubuh PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu berarti pengembangan pada tataran landasan keilmuan. Salah satu landasan ilmu pendidikan adalah landasan filosofis yang meliputi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Penelitian ini menekankan pada materi kajian yang termasuk pada realitas isi PKn. Oleh karena itu, penelitian ini adalah kajian terhadap landasan filosofis PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu yang lebih memfokuskan pada

aspek ontologis dengan obyek telaah pada aspek idiil. Meskipun demikian, aspek epistemologis dan aksiologis merupakan kajian yang tidak terpisahkan dari aspek ontologi. Pengumpulan data dan analisis hasil penelitian dilakukan secara kualitatif konseptual-filosofis, dan historis. Kajian ontologis dengan fokus aspek idiil merupakan obyek telaah yang tepat bagi studi kualitatif historik atau filosofik. (Winataputra, 2001).

Sekaitan dengan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian umum yang diajukan sebagai berikut: (1) Apa ontologi PKn dalam konteks filsafat pendidikan disiplin ilmu?; (2) Bagaimana peran PKn dalam membangun karakter warga negara dan bangsa?; dan (3) Bagaimana proses pembangunan karakter bangsa Indonesia dan tantangan dalam menghadapi era masa kini dan masa depan secara konseptual, filosofis, dan historis?

### **C. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Dalam penelitian ini fokus masalah bukan pada kehidupan dari individu subjek terfokus melainkan pada pemikirannya tentang PKn berupa konsepsi yang dipahami, dipersepsi, dan dikaji dari tinjauan menurut pengalaman responden sebagai subyek terfokus. Secara umum fokus masalah dalam penelitian ini adalah hasil pemikiran tentang makna dan atau nilai dari pengetahuan, pengalaman, sikap, persepsi, dan gagasan subyek terfokus tentang PKn dalam perannya membangun karakter bangsa secara konseptual dan filosofis dalam konteks pendidikan IPS.

Secara lebih spesifik, ada tiga fokus masalah dalam penelitian ini, yakni (1) Kajian konseptual ontologis tentang filsafat PKn yang berkontribusi terhadap pembentukan struktur pendidikan disiplin ilmu PKn; (2) Kajian tentang

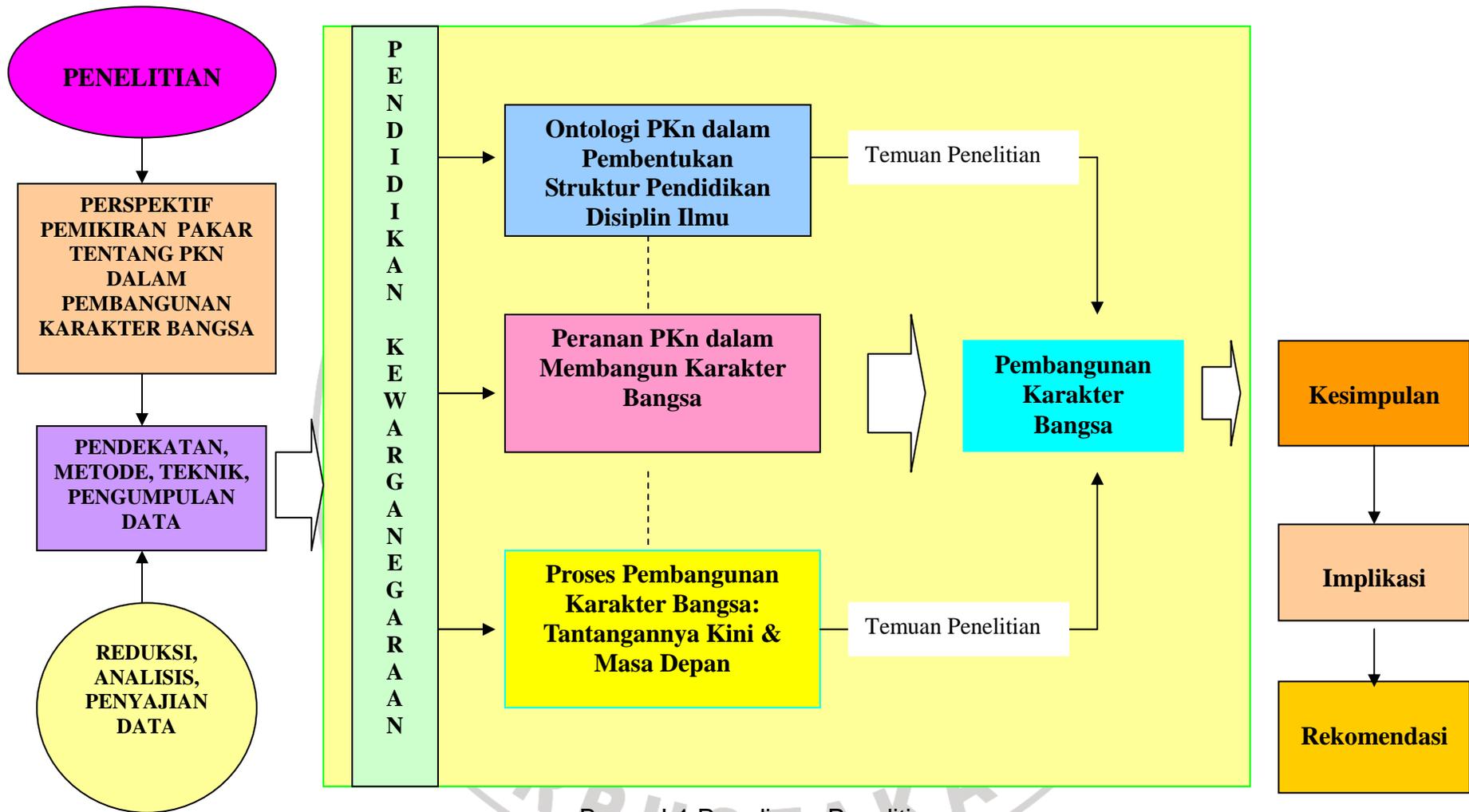
peran PKn dalam membangun karakter warga negara dan bangsa; dan (3) Kajian tentang pembangunan karakter bangsa secara konseptual, ontologis-epistemologis-aksiologis, analitis, fenomenologis dan historis sebagai bahan dalam pengorganisasian materi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, tantangan kehidupan masa kini dan masa mendatang serta kepentingan nasional.

Agar lebih terarah, maka fokus masalah di atas dirinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Menurut pengalaman, persepsi, kajian, argumen, dan tilikan para pakar, apakah ontologi PKn itu?; bagaimana kedudukan PKn dalam konteks filsafat pendidikan; apakah domain PKn yang berkontribusi secara epistemologis terhadap pembentukan struktur pendidikan disiplin ilmu?
2. Menurut pengalaman, persepsi, kajian, argumen, dan tilikan para pakar, bagaimana peran PKn secara aksiologis dalam membangun karakter warga negara dan kontribusinya terhadap karakter bangsa Indonesia?
3. Menurut pengalaman, persepsi, kajian, argumen, dan tilikan para pakar, apakah hakikat karakter bangsa itu; bagaimana proses pembangunan karakter bangsa menurut sejarah perkembangan bangsa Indonesia; apa tantangan pembangunan karakter bangsa di Indonesia untuk masa kini dan masa mendatang?

#### **D. Paradigma Penelitian**

Alur pikir penelitian ini secara paradigmatik dapat digambarkan dalam bentuk bagan paradigma penelitian sebagai berikut.



Bagan I-1 Paradigma Penelitian

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan melakukan investigasi dan kajian terhadap makna dan atau nilai dari pengetahuan, pengalaman, sikap, persepsi, dan gagasan responden sebagai subyek terfokus tentang PKn dalam pembangunan karakter warga negara dan bangsa secara konseptual, filosofis menurut pendapat pakar dalam konteks pendidikan IPS.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif dan konseptual-filosofis tentang ontologi PKn; kedudukan PKn dalam konteks filsafat pendidikan; dan domain PKn serta kontribusinya terhadap pembentukan struktur pendidikan disiplin ilmu.
- b. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif dan konseptual-filosofis tentang peran PKn dalam membangun karakter warga negara dan kontribusinya terhadap karakter bangsa Indonesia.
- c. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif dan konseptual-filosofis tentang hakikat karakter bangsa; proses pembangunan karakter bangsa dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia; dan tantangan pembangunan karakter bangsa di Indonesia untuk masa kini dan masa mendatang.

## **2. Manfaat penelitian**

Secara teoritik, penelitian ini akan menggali, mengkaji dan mengorganisasikan PKn dalam pembangunan karakter bangsa secara konseptual-filosofis yang akan menghasilkan landasan PKn dan kerangka dasar secara konseptual-teoritis tentang pembangunan karakter bangsa sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan PKn dan pembangunan karakter bangsa. Temuan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang PKn sebagai bahan masukan ke arah pengembangan PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu.
- b. Para praktisi untuk pengembangan tenaga kependidikan dan keguruan di lembaga pendidikan tinggi yang bertugas menghasilkan lulusan tenaga guru PKn.
- c. Para pengembang kurikulum PKn baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun lingkup masyarakat dan birokrasi.
- d. Para praktisi PKn baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun lingkup masyarakat dan birokrasi.
- e. Para pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakannya terutama yang terkait dengan program PKn dalam upaya mempersiapkan warga negara yang cerdas baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, dan bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara berkeadaban.

## **F. Pengertian Istilah**

### **1. Pendidikan Kewarganegaraan**

Istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” di Indonesia merupakan terjemahan dari kepustakaan asing ‘*civic education*’ atau ‘*citizenship education*’ atau ‘*education for citizenship*’. Meskipun demikian, dua istilah tersebut pernah dibedakan ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam kurikulum Pendidikan Kewargaan Negara Tahun 1968. Istilah ‘*civic education*’ biasanya diterjemahkan menjadi ‘Pendidikan Kewargaan Negara’, disingkat PKN, sedangkan ‘*citizenship education*’ biasanya diterjemahkan menjadi ‘Pendidikan Kewarganegaraan’, disingkat PKn. Selain perbedaan istilah, secara konseptual dua istilah tersebut memiliki perbedaan ruang lingkup kajian seperti dapat dilihat dari pendapat Cogan (1999:4) yang menyatakan bahwa ‘*civic education*’, umumnya merujuk pada jenis mata pelajaran yang diselenggarakan dalam struktur sekolah formal. Mata pelajaran tersebut memfokuskan pada struktur, proses dan simbol-simbol pemerintahan, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, proses penyelenggaraan pemerintahan, simbol-simbol negara, peran dan tanggung jawab warga negara. Sedangkan, PKn adalah istilah yang lebih inklusif dan merupakan pengalaman belajar di sekolah juga di luar sekolah baik nonformal maupun informal yang terjadi di lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media dan sebagainya yang membantu untuk membentuk totalitas warga negara.

Dalam penelitian ini, pengertian kewarganegaraan lebih difokuskan pada pengertian pertama, yakni Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dalam istilah '*civic education*'. Meskipun demikian, istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini tetap menggunakan istilah 'Pendidikan Kewarganegaraan' mengingat istilah ini lebih memasyarakat dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi II, 1995), dua istilah tersebut tidak memiliki perbedaan makna yang berarti.

## **2. Karakter**

Dalam pengertian harfiah, karakter mempunyai makna psikologis atau sifat kejiwaan karena terkait dengan aspek kepribadian (*personality*), akhlak atau budi pekerti, tabiat, watak, sifat kualitas yang membedakan seseorang dari yang lain atau kekhasan (*particular quality*) yang dapat menjadikan seseorang terpercaya dari orang lain. Dari konteks ini pun, karakter mengandung unsur moral, sikap bahkan perilaku karena untuk menentukan apakah seseorang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, hanya akan terungkap pada saat seseorang itu melakukan perbuatan atau perilaku tertentu.

Konsep "karakter" telah mendapat perhatian dari para ahli terutama pakar psikologi dalam lebih dari tiga dekade terakhir (Cronbach, 1977; Lickona, 1992; Sparks, 1991) yang mengkhususkan kajian pada upaya mendefinisikan karakter untuk tujuan pendidikan hingga pembangunan warga negara yang memiliki karakter yang baik (*good character*).

### **3. Karakter Bangsa**

Istilah "karakter bangsa" yang dalam literatur Barat identik dengan '*national character*' sangat erat terkait dengan masalah kepribadian dalam psikologi sosial. Dalam penelitian ini, karakter bangsa dimaknai sebagai ciri-ciri kepribadian yang relatif tetap, gaya hidup yang khas, cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersifat abstrak tersebut dapat muncul dalam konteks perilaku yang terikat oleh aspek budaya bangsa Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada UUD 1945.

### **4. Pembangunan karakter bangsa**

Dalam kepustakaan Barat, istilah 'pembangunan karakter bangsa' identik dengan istilah *national character building*. Dalam penelitian ini, pembangunan karakter bangsa dimaknai sebagai suatu proses membina, memperbaiki, dan mewarisi warga negara dengan konsep, perilaku, dan nilai luhur budaya Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada UUD 1945 sehingga mempribadi (*internalized, personalized*) ke dalam diri individu warga negara dan bangsa Indonesia.

### **5. Perspektif**

Dengan merujuk kepada pendapat Schwartz dan Ogvily (Lincoln dan Guba, 1985:55), "perspektif" dalam penelitian ini dimaknai sebagai tinjauan

dari jarak fokus tertentu. Dari sudut pandang mana subyek terfokus melihat akan mempengaruhi pemahaman, pendapat, dan gagasannya tentang PKn. Orang yang berbeda memandangi suatu objek kajian yang sama dari jarak fokus yang berbeda akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Fokus pengamatan subyek terfokus pada PKn dalam pembangunan karakter bangsa mungkin hanya memberikan bagian tertentu dari sebuah gambaran utuh PKn dan gambaran utuh tersebut merupakan kesan (*image*) yang dibuat secara morfogenetis dari perspektif ganda.

#### **6. Perspektif Pemikiran**

Tinjauan dalam rangka mencari upaya untuk menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan akal budi, mempertimbangkan, merenungkan, mengingat, memperhatikan, mempersepsi, mengkaji, dan memberi pendapat dan argumen, serta menilik PKn secara ontologis dan konseptual dalam rangka membangun karakter bangsa dari jarak fokus tertentu dan latar belakang keilmuan para subyek terfokus.

#### **7. Pakar**

Istilah “pakar” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek terfokus, yakni nara sumber penelitian yang berlatar keilmuan tentang PKn atau keilmuan lain yang banyak menaruh perhatian tinggi terhadap pembangunan karakter bangsa dan pengembangan PKn baik dalam dimensi kurikuler, sosial kultural maupun akademik.

## **8. Kajian Konseptual-Ontologis**

Upaya mengkaji isi materi PKn sebagai wahana pembangunan karakter bangsa menggunakan akal budi, mempertimbangkan, dan merenungkan konsep-konsep dasar dan realitas isi PKn yang layak hasil pemikiran para ahli yang memiliki perhatian tinggi terhadap pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

## **8. Kajian *grounded theory***

*Grounded theory* dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya untuk menemukan teori dari data yang diperoleh secara induktif, bukan data terdahulu. Sebagai salah satu tradisi penelitian kualitatif, *grounded theory* merupakan skema analisis yang abstrak dari suatu fenomena dalam situasi tertentu. (Creswell, 1998:55-56) Situasi yang dimaksud adalah kondisi ketika peneliti berinteraksi dengan subyek terfokus selama proses penelitian.

## **9. Pendidikan IPS**

“Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial” (PIPS) dalam penelitian ini adalah pendidikan disiplin ilmu sebagai integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk tujuan pendidikan. Artinya, berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuwan sosial, aspek metode maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu

sosial, dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk kepentingan pendidikan. Untuk memahami masalah PIPS seseorang hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi struktur, ide fundamental, pertanyaan pokok (*mode of inquiry*), metode yang digunakan dan konsep-konsep setiap disiplin ilmu, disamping pemahamannya tentang prinsip-prinsip kependidikan dan psikologi serta permasalahan sosial.

